

Ecces

Economics, Social, and Development Studies

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH *TELLUNGPOCCO'E*
Andi Samsir

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN DI DESA AENG BATU-BATU
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
Abdul Rahman dan Nuratul Awalia

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
MELALUI PEMBENTUKAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG
Silvera Sekar Wijayanti dan Darwanto

PENGARUH PENDAPATAN PETANI PADI TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN
ANAK DI KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU
Juwinda Sardi dan Hasbiullah

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI MEUBEL TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2008-2013
Siska Liyana dan Abdul Wahab

ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI (*FOREIGN DEBT*) DAN PENANAMAN
MODAL ASING (PMA) TERHADAP NILAI PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
INDONESIA
Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi

ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR
TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA
Marina dan Amiruddin K

ANALISIS EFISIENSI KLASTER RUMPUT LAUT DI KABUPATEN BREBES
Mastur Mujib Ikhsani

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Ecces

Economics, Social, and Development Studies

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH <i>TELLUNGPOCCO'E</i> <i>Andi Samsir</i>	1
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN DI DESA AENG BATU-BATU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR <i>Abdul Rahman dan Nuratul Awal</i>	16
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PEMBENTUKAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG <i>Silvera Sekar Wijayanti dan Darwanto</i>	35
PENGARUH PENDAPATAN PETANI PADI TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN ANAK DI KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU <i>Juwinda Sardi dan Hasbiullah</i>	58
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI MEUBEL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2008-2013 <i>Siska Liyana dan Abdul Wahab</i>	71
ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI (<i>FOREIGN DEBT</i>) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP NILAI PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA <i>Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi</i>	82
ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA <i>Marina dan Amiruddin K</i>	101
ANALISIS EFISIENSI KLASTER RUMPUT LAUT DI KABUPATEN BREBES <i>Mastur Mujib Ikhsani</i>	115

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PEMBENTUKAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG

Silvera Sekar Wijayanti¹
Darwanto²

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) akan berhasil jika dilakukan dengan konsep dan implementasi yang baik. Namun, kenyataannya perkembangan ekonomi lokal di Indonesia yang di kelola dalam klaster usaha masih berjalan lambat dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Perkembangan ekonomi lokal masih menghadapi kesulitan karena kurangnya inisiatif, pengembangan usaha dan perluasan jaringan dari pelaku usaha. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh pembentukan klaster dalam implementasi pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan langkah pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal dengan membentuk klaster kelompok usaha. Fungsi klaster kelompok usaha antara lain membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal. Pembentukan klaster kelompok usaha mendorong pemanfaatan potensi lokal. Penelitian ini menunjukkan pengembangan ekonomi lokal yang dijalankan oleh para pelaku usaha yang memanfaatkan tanaman enceng gondok berdampak pada meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: Pengembangan ekonomi lokal, klaster, kelembagaan, modal sosial

A. PENDAHULUAN

Tantangan ekonomi di era globalitas saat ini adalah munculnya kebutuhan akan instrumen dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah, awalnya berkembang di negara-negara Eropa dan di Amerika Serikat sejak tahun 1960. Wolfe and Creutzberg (2003) menjelaskan pengembangan ekonomi lokal telah mengalami tiga tahapan besar atau gelombang pengembangan, yaitu (1) pengembangan dengan pendekatan tradisional

¹ FEB Undip Semarang, Email: silverasekar@yahoo.com

² FEB Undip Semarang, Email: darwanto@undip.ac.id

(*traditional approach*); (2) pengembangan kapasitas (*capacity building approach*); dan (3) pengembangan yang fokus pada kualitas kehidupan dan aliran informasi. Pendekatan tradisional (*traditional approach*) yang berkembang sejak periode 1950-an sampai dengan pertengahan 1980-an memfokuskan pada upaya menarik perusahaan-perusahaan milik pribadi atau swasta melalui input produksi yang murah, pemberian subsidi langsung terutama untuk infrastruktur, dan penurunan pajak. Berbagai insentif tersebut diharapkan para pengusaha tertarik menempatkan perusahaannya di lokasi-lokasi tertentu, sehingga mampu menggerakkan perkembangan ekonomi di lokasi-lokasi tersebut. Pendekatan kapasitas (*capacity building approach*) yang berkembang selama periode 1980-an menekankan pada pengembangan infrastruktur pendidikan dan teknologi dalam membangun basis pengetahuan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan daya kompetitif dalam merespon perubahan lingkungan ekonomi.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat dilakukan melalui ekspor, pemasaran, klaster, kemitraan dan pemberdayaan. PEL memiliki tantangan dalam implementasinya, yakni instansi yang solid pada tingkat lokal untuk mengembangkan inisiatif lokal sumberdaya lokal (*local resources*), perbaikan *governance*, dan pengembangan jaringan (*networking*). Ciri utama PEL adalah menitikberatkan pada kebijakan "*endogenous development*", yaitu mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarah dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi (Blakely, 1989). Tujuan PEL adalah meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja yang tersedia untuk penduduk setempat. Pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif, bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan publik, sektor usaha serta keputusan dan tindakan masyarakat harus pro-PEL dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama.

Kegiatan PEL harus bekerjasama dengan kegiatan publik lainnya dan sifatnya saling terkait dengan aspek publik lainnya. Kebijakan PEL akan dapat sukses jika dilaksanakan sesuai dengan asas *good governance*, yaitu kepercayaan, keterbukaan dan akuntabilitas. Kenyataannya di Indonesia, sistem PEL yang dikelola dalam bentuk sentra-sentra klaster berjalan sangat lambat dibandingkan dengan negara India dan negara lainnya.

JICA (2004) menunjukkan penyebaran klaster terbesar berada di Provinsi Jawa-Bali (46,5%), diikuti Sumatera (18,5%), Sulawesi (11,3%), Indonesia bagian Timur (11,3%) dan Kalimantan (8,7%). Penyebaran klaster tertinggi berada di Jawa Tengah dengan jumlah 5.715 klaster, hal ini setara dengan 25,2% total klaster di Indonesia. Weijland (1999) berestimasi lebih dari 40% industri klaster di Indonesia berlokasi di Jawa Tengah. Klapwijk (1997) menemukan bahwa setidaknya ada 4.400 sentra industri di Jawa Tengah pada tahun 1989, dimana 90,9 % nya diklasifikasikan sebagai klaster industri pedesaan. Kondisi sentra industri di Kabupaten Semarang tersebar di berbagai kecamatan dengan komoditas yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Sentra-sentra unggulan di Kabupaten Semarang

No	Komoditas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1.	Logam (las)		Bergas
2.	Mebel	Dadapayan	Suruh
3.	Makanan olahan		Getasan
4.	Gula Kelapa	Plumbon,	Suruh
5.	Krupuk	Susukan	Susukan
6.	PengergajianKayu	Klero, Cukil	Tegasan
7.	Bordir	Bawen	Bawen
8.	Batik	Gemawang	Jambu
9.	Makanan Olahan		Jambu
10.	Kuningan/Kaligrafi	Bedono	Jambu
11.	Kopi	Bedono	Jambu
12.	Opak	Ngadireso	Sumowono
13.	Gula Aren	Trayu, Pledokan	Sumowono
14.	Pande Besi	Lodoyong	Ambarawa
15.	Tahu Serasi	Kenteng	Bandungan
16.	Mebel	Banyukuning	Pringapus
17.	Keset	Wonoyoso	Pringapus
18.	Kasur	Wonoyoso	Pringapus
19.	Jenang	Wonoyoso	Tenggaran
20.	Krupuk	Karangduren	Tuntang
21.	Pande Besi	Watuagung	Tuntang
22.	Kripik	Watuagung	Ungaran
23.	Tahu Bakso		Ungaran
24.	Rogo Rege	Plumutan	Bancak
25.	Bordir	Jetis	Bandungan
26.	Makanan Olahan	Bandungan	Banyubiru
27.	Anyaman Bambu	Tegaron	Banyubiru
28.	Enceng Gondok	Kebondowo	Banyubiru
29.	Keripik Ikan	Kebondowo	Tuntang
30.	Krupuk	Tuntang	Tuntang

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2013

Langkah awal dalam PEL adalah menitik beratkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui konsep pengembangan klaster industri. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 telah menetapkan 3 klaster unggulan, yaitu klaster pertanian berbasis *processing industry*, klaster kawasan pariwisata unggulan dan klaster industri berbasis ekspor. Salah satu klaster unggulan dan klaster pertanian berbasis *processing industry* adalah kerajinan enceng gondok. Model untuk mengembangkan kerajinan enceng gondok dengan pertimbangan PEL adalah melalui pengembangan sentra klaster.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembentukan Klaster Industri Kecil

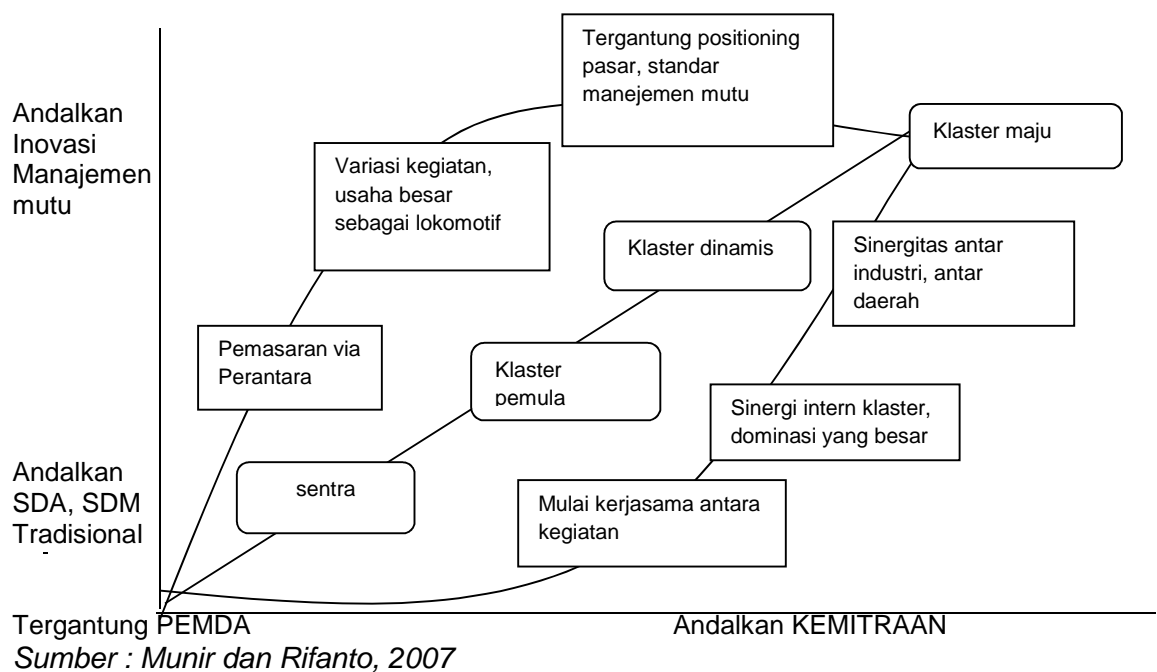
Sentra atau klaster secara teoritis terbentuk karena dua hal, yaitu faktor sejarah dan faktor bentukan atau manipulasi. Dua faktor tersebut akan membentuk dua jenis klaster, yaitu klaster dewasa dan klaster baru. Klaster dewasa biasanya terbentuk ketika sebuah daerah/kota memiliki banyak pengrajin, sehingga akan terbentuk sebuah Klaster Artisanal. Klaster tersebut dikarenakan suatu hal, mampu bertahan dan menarik pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan mereka. Kemunculan klaster industri dimulai ketika muncul pihak yang bersedia menjadi pemasok input khusus bagi klaster artisanal tersebut. Klaster bentukan terjadi karena kesengajaan pemerintah atau institusi lain yang berkeinginan untuk membentuk sebuah klaster. Klaster-klaster bentukan sering disebut sebagai klaster baru karena pendiriannya cenderung lebih muda usianya dibandingkan klaster tradisional yang ada saat ini.

Klaster industri kecil terbentuk karena adanya permintaan (*demand*) yang tidak layak dipenuhi oleh industri menengah maupun besar, dan di sisi lain permintaan tersebut sulit untuk dipenuhi hanya oleh satu atau sejumlah kecil perusahaan industri kecil (LPM-ITB, 2001). LPM-ITB (2001) menyatakan bahwa dilihat dari proses munculnya, klaster industri kecil dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu (1) Klaster yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan swadaya masyarakat; (2) Klaster yang khusus diciptakan oleh pemerintah, misalnya PIK (Perkumpulan Industri Kecil) dan LIK (Lokasi Industri Kecil).

Tahapan Pengembangan Kluster

Tahapan pengembangan kluster industri dalam perekonomian daerah perlu disesuaikan dengan industri yang bersangkutan, termasuk perilaku pelaku bisnis dan karakteristik khas setempat/lokal. Pengembangan kluster dapat membantu memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan kesempatan kerja daerah. Tahapan pengembangan kluster dimulai dari pengembangan sentra yang digambarkan oleh Munir dan Rifanto (2007) sebagai berikut

Gambar 1
Tahapan Pengembangan Kluster



Konsep Pengembangan Daerah

Blakely (1989) menjelaskan bahwa PEL adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan kelompok masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan mengambil bagian dalam susunan persekutuan (*partnership*) dengan sektor swasta atau yang lainnya, menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi lokal dalam zona perekonomian yang telah ditetapkan dengan baik. Ciri utama dari PEL ini didasarkan pada kebijakan pengembangan endogen (*endogen development*) yang menggunakan kekuatan lokal sumberdaya manusia, kelembagaan, dan fisik. Blakely menambahkan pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan sektor swasta merupakan *partner* penting dalam proses pengembangan perekonomian lokal.

Coffey dan Polese (1984) menjelaskan pengertian PEL sebagai peningkatan peran elemen-elemen *endogeneous* dalam kehidupan sosial ekonomi suatu lokalitas dengan tetap melihat keterkaitan serta intergrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas. PEL diartikan sebagai tumbuhnya kewirausahaan lokal serta berkembangnya perusahaan lokal. Sejalan dengan pernyataan diatas, Scuhumpeter dalam Coffey dan Polese (1984) menambahkan bahwa konsep PEL yang dibangun atas dasar semangat jiwa kewirausahaan dapat dijadikan penggerak utama ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu indikasi di dalam pengembangan wilayah.

Coffey dan Polese (1984) menjelaskan empat tahapan dari proses pengembangan ekonomi adalah sebagai berikut: (1) Tumbuh kembangnya kewiraswastaan lokal. Masyarakat lokal mulai bisnis kecil-kecilan dan mengambil resiko keuangan dengan menginvestasikan modalnya dalam kegiatan bisnis baru; (2) Pertumbuhan dan perluasan perusahaan-perusahaan local. Banyaknya perusahaan yang mulai beroperasi dan perusahaan-perusahaan yang sudah ada semakin bertambah besar dalam hal penjualan, tenaga kerja dan keuntungannya (lepas landasnya perusahaan lokal); (3) Berkembangnya perusahaan-perusahaan lokal keluar lokalitas; (4) Terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang bertumpu pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan komparatif aktivitas ekonomi tersebut.

Aplikasi dari Konsep PEL dapat dilakukan melalui pengembangan industri terutama industri kecil. Peranan industri dalam pertumbuhan wilayah salah satunya dikemukakan oleh Yeates and Gardner dalam Tambunan (2002) bahwa kegiatan industri merupakan salah satu faktor penting dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Kaitan perkembangan wilayah dengan kegiatan industri merupakan proses yang simultan. Hal ini disebabkan oleh adanya efek multiplier dan inovasi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri berinteraksi dengan potensi dan kendala yang dimiliki wilayah.

Pengembangan Industri Kecil Kerajinan untuk menunjang Pengembangan Ekonomi Lokal

Industri kecil terutama industri kecil kerajinan seringkali dipandang sebagai marjinal dengan berbagai kelemahan yang antara lain sebagai berikut : (1) Tidak

mempunyai perencanaan tertulis baik perencanaan produksi, perencanaan pasokan barang, perencanaan tenaga kerja dan sebagainya; (2) Kurang berorientasi pada masa depan; (3) Kurang memperhatikan administrasi dan sumberdaya manusia; (4) Standarisasi dan spesialisasi produk kurang terjaga; (5) Kapasitas peralatan dan mesin yang terbatas sehingga hanya mampu mengerjakan pekerjaan yang sederhana dan berakibat pada ukuran-ukuran dan kapasitas tertentu akan mahal; (6) Perancangan (desain), riset dan pengembangan produk kurang diperhatikan; (7) Memiliki posisi tawar yang lemah dalam pasar; dan (8) Akses kepermodalan yang lemah.

Industri kecil kerajinan juga memiliki kekuatan yang perlu diperhatikan antara lain : (1) Hubungan antara aspek fisik dan rekayasa. Faktor ini ditandai dengan adanya keselarasan hubungan antara aspek fisik dan rekayasa dalam proses produksi. Hubungan ini menyebabkan produk-produk tertentu hanya menguntungkan apabila dibuat oleh industri kecil, akibat sifat produknya yang ringan dan kecil, membutuhkan tingkat ketelitian sedang, dapat dikerjakan dengan mesin-mesin ringan dalam proses perakitan yang sederhana dengan tingkat pulang pokok yang dapat dicapai dalam kualitas yang rendah; (2) Produk yang membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil dan ketelitian yang tinggi; (3) Produk yang hanya dibuat dalam jumlah kecil dan tidak baku, dibuat bervariasi sesuai dengan permintaan konsumen; (4) Produk dengan keunggulan khusus dalam aspek desain ataupun produk khusus yang memerlukan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatannya; (5) Hubungan antara pekerja dan pimpinan erat, maupun antar pekerja sendiri. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan langkanya pemutusan hubungan kerja; (6) Pelayanan penjualan yang lebih baik; dan (7) Cepat memanfaatkan kesempatan yang sedang berkembang.

Keberadaan industri kecil kerajinan memiliki potensi untuk mewujudkan PEL di suatu wilayah. Konsep PEL berupaya memberdayakan potensi-potensi lokal dengan cara meningkatkan kewirausahaan lokal untuk mencapai pertumbuhan dan kemandirian lokalitas. Konsep ini selaras dengan karakteristik industri kecil kerajinan yang umumnya berbasis pada sumber daya lokal. Industri kecil kerajinan dalam hal ini dapat menjadi pemicu bagi pengimplementasian PEL suatu wilayah. Namun demikian, untuk mewujudkan PEL disuatu wilayah diperlukan prasyarat tertentu, baik dari industri kecil kerajinan itu sendiri (sebagai komponen pemicu), kondisi pengembangan wilayah suatu daerah dan pemerintah

daerah setempat (Firman, 1999). Prasyarat yang dimaksud adalah bagaimana ketiga komponen diatas dapat mendorong timbulnya kewirausahaan lokal sebagai indikasi berjalannya konsep PEL di suatu wilayah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan BAPPEDA Kabupaten Semarang, kelompok klaster klinting, masyarakat sekitar Desa Kebondowo, pengrajin enceng gondok, petani/pencari enceng gondok, dan berbagai pihak yang telah dipilih untuk menjadi informan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, publikasi ilmiah yang berkaitan dengan PEL serta dari instansi terkait seperti dinas koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan Kabupaten Semarang, BAPPEDA Kabupaten Semarang, kantor Camat Banyubiru, Kantor Kelurahan Kebondowo.

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini, yaitu metode wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu (Herdiansyah, 2009). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti menyusun langkah analisis yang akan dilakukan, yakni: (1) Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diorganisir persamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan; (2) Menentukan tema dan memberi kode untuk setiap tema dari data-data yang telah diorganisir; (3) Mencari keterkaitan antar tema; (4) Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan; dan (5) Hasil interpretasi data dituangkan dalam deskriptif analitik kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Proses Pembentukan PEL di Kecamatan Banyubiru

Masyarakat dan pengrajin enceng gondok merupakan komponen utama dalam pembentukan PEL di Kecamatan Banyubiru. Mereka berperan dalam pengembangan potensi lokal yang bersumber dari alam. Forum atau organisasi merupakan wadah bagi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam pengembangan sektor UKM. Pemerintah kemudian membentuk suatu organisasi yang khusus mengelola tentang potensi lokal yang menangani kerajinan enceng gondok bernama klaster Klinting. Wawancara yang dilakukan dengan Ketua klaster klinting menyatakan:

“Sebenarnya PEL itu sudah ada sejak tahun 2010 dengan nama klaster Maju Jaya dan klaster pada tahun 2010 itu masih bersifat klaster administrasi yang diwajibkan pemerintah cuman ada namanya saja tapi tidak ada kegiatan dan pada saat itu saya belum jadi anggota terus ada reorganisasi saya dilibatkan oleh BAPPEDA Kabupaten.”

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa PEL sudah direncanakan untuk menggali potensi lokal yang ada, tetapi belum ada kegiatan yang aktif dari klaster Klinting tersebut. Sebelum ada pembentukan klaster Klinting, para pengrajin bekerja sama dalam bidang produksi dan pemasaran ketika salah satu dari mereka mendapatkan pesanan dengan skala besar. Pembentukan Klaster Klinting ini diharapkan para pengrajin enceng gondok mempunyai tempat yang lebih tertata dengan baik dan terarah perkembangannya sehingga mendapatkan bantuan dan binaan dari pemerintah.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berupa klaster Klinting secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan perekonomian Kecamatan Banyubiru khususnya Desa Kebondowo. Hal ini dikarenakan potensi lokal dan pengrajinnya banyak ditemui di Desa Kebondowo. Perlu adanya pematangan program-program yang akan dilaksanakan, kerjasama dari seluruh dinas-dinas yang terkait dan para anggota klaster serta seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal.

Perubahan nama klaster sudah beberapa kali terjadi terakhir secara resmi berganti nama menjadi Klaster Klinting sejak tahun 2013 seperti yang diungkapkan oleh Kepala Klaster Klinting:

“Pembentukan PEL ini baru, belum berkembang secara optimal jadi pembentukannya itu tahun 2012 akhir terus diresmikan itu maret 2013”

Pembentukan Klaster sangat penting dalam mendukung PEL yang ada di Desa Kebondowo. Peran tersebut seperti yang diungkapkan selaku ketua Klaster Klinting yaitu:

“Klaster Klinting tempat para pelaku pengrajin untuk perluasan jaringan keanggotaan dengan menggalakkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku pembuatan kerajinan dan juga untuk memamerkan produk hasil dari enceng gondok serta untuk memajukan industri kerajinan enceng gondok agar semakin dikenal oleh masyarakat luas serta mensejahterahkan para pengrajin”

Tujuan dari Klaster Klinting adalah sebagai wadah untuk mempermudah perluasan jaringan keanggotaan dengan menggalakkan kegiatan yang bermanfaat untuk memperkenalkan produk hasil kerajinan enceng gondok, memajukan industri kerajinan enceng gondok agar semakin dikenal oleh masyarakat luas serta mensejahterahkan para pengrajin. Selain berkolaborasi dengan BAPPEDA Kabupaten, Klaster Klinting juga bekerjasama dengan Disperindang dalam segi pelatihan dan UMKM. Hal ini bertujuan agar terbentuknya suatu kerjasama dari kelompok dagang sampai kelompok jasa. Kerjasama antara dinas, pelaku usaha dan masyarakat yang mendukung akan mempermudah dalam proses kerjasama mengembangkan potensi lokal.

Peran Kelembagaan Lokal

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan dan institusi, pada umumnya lebih di arahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem.

Proses pembentukan Klaster Klinting di Kecamatan Banyubiru melibatkan BAPPEDA Kabupaten dan para pengrajin enceng gondok. Proses pembentukan tersebut melalui berbagai tahapan dan peran suatu lembaga memang sangat dibutuhkan dalam PEL. Ketua Klaster Klinting menjelaskan bahwa Bappeda dan

Disperindag sangat mendukung adanya Klaster Klinting, contohnya ikut terlibat dalam memberikan pelatihan. Wawancara dengan ketua klaster Klinting mengungkapkan :

“Yang terlibat dalam pembentukan Klaster eceng gondok itu BAPPEDA Kabupaten dan BAPPEDA Provinsi, cuman yang terlibat langsung hanya BAPPEDA Kabupaten. Disperindag itu hanya memberikan pelatihan dan tidak begitu terlibat secara keseluruhan kok”

Peran Stakeholder terhadap Klaster

Stakeholder didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, baik dalam mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas atau kegiatan yang menjadi isu utama. PEL tidak terlepas dari peran orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Narasumber dari pihak BAPPEDA Kabupaten Semarang, yaitu pengampu kegiatan FEDEP di bidang ekonomi mengungkapkan :

“Peran stakeholder itu pendampingan, pemberian modal, pemberian workshop-workshop itu dilakukan FEDEP sejak tahun 2003 tapi terbentuknya FPESD di provinsi sudah sejak tahun 2001 kalo tahun ini permodalan klaster eceng gondok diberikan ke stakeholder yang lain yang mau kerjasama dengan klaster eceng gondok dan UNNES tahun ini akan bekerjasama dengan klaster klinting mbak.”

BAPPEDA Kabupaten Semarang berperan sebagai pendamping, pemberi modal dan mediator. Sebagai mediator, BAPPEDA Kabupaten melakukan pelatihan-pelatihan kepada klaster Klinting serta memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk modal dan pengadaan *workshop* dengan melakukan koordinasi dengan para anggota klaster. Namun dalam hal memfasilitasi sarana dan prasarana, BAPPEDA Kabupaten belum memberikan ruang pameran untuk pemasaran hasil kerajinan eceng gondok. Wawancara yang dilakukan dengan BAPPEDA selaku pengampu kegiatan FEDEP dibidang ekonomi mengungkapkan:

“Belum mbak, ini masih wacana inginnya ya dibuatkan ya mbak, tapi prosesnya kan tidak mudah, kalo workshop juga para anggota sering ngomong kapan ada pembangunan showroom jadi pemasarannya bisa semakin jelas ya kami masih memikirkannya semoga saja bisa segera membangun showroom untuk proses pemasaraannya.”

BAPPEDA selaku pengampu kegiatan FEDEP menjelaskan bahwa BAPPEDA Kabupaten belum membuatkan *showroom* untuk pemasaran hasil kerajinan. Padahal dengan adanya *showroom* yang resmi dari BAPPEDA

Kabupaten, tidak menutup kemungkinan pemasaran dan kemajuan kluster Klinting akan semakin berkembang dan maju. Peran BAPPEDA Kabupaten dan dinas yang terkait menjadi *stakeholder* dalam pendampingan, pelatihan, memberikan bantuan alat-alat yang dibutuhkan. Selain itu, BAPPEDA Kabupaten juga rutin memberikan *workshop-workshop* beserta narasumber yang terlatih.

Meskipun pendirian kluster klinting baru berjalan kurang lebih 3 tahun, tetapi hubungan para anggota kluster dan BAPPEDA Kabupaten berjalan dengan baik seperti yang dikatakan oleh pengampu kegiatan FEDEP di bidang ekonomi:

“Hubungan BAPPEDA dan anggota PEL sangat baik, tapi dua tahun kemarin hubungannya agak tersendat mbak, ketua FEDEP nya sering sekali sibuk jadinya kluster-kluster ini terbengkalai kita yang bawahan ya bingung mau ngapain dan berbuat apa kita juga tidak berani maju dan bertindak dari tahun 2013-2014 kalo ada kegiatan atau pertemuan penting tidak datang.”

Hubungan kerjasama yang terjadi antara anggota PEL dan BAPPEDA Kabupaten terjalin dengan baik, tetapi dalam setiap kepengurusan sebuah organisasi terdapat *up* dan *down*. Hal yang sama juga terjadi didalam kluster, ketua FEDEP jarang mengikuti pertemuan yang diadakan. Wawancara pengampu kegiatan FEDEP di bidang ekonomi menambahkan:

“Tapi sekarang ketuannya sudah diganti mbak, sekarang itu dari UNDARIS ya insya Allah tahun 2015 ini akan lebih baik untuk kemajuan kluster nanti dimulai dengan pertemuan workshop antar provinsi kemarin.”

Pengampu FEDEP di bidang ekonomi, mengatakan bahwa dengan adanya pergantian ketua dari UNDARIS, harapan BAPPEDA Kabupaten dan para anggota kluster adalah bisa saling bekerjasama dan tentunya akan semakin baik dan terus berkembang. PEL sangat diandalkan untuk kemajuan perekonomian Kabupaten Semarang serta menggali potensi lokal yang ada di suatu wilayah tersebut.

Tabel. 4.1
Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kluster

No	Stakeholders	Peran Stakeholders
1.	BAPPEDA Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagai mediator dan penyediaan fasilitas-fasilitas mengenai Kluster ✓ BAPPEDA mengadakan pameran setiap setahun sekali ✓ Membangun mental masyarakat dan para anggota kluster dan menanamkan pemikiran-pemikiran untuk peduli terhadap potensi lokal yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan kelompok kluster
2.	Pihak Ketiga/investor (GIZ dan Disperindang)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memantau dan memberikan bantuan untuk perkembangan Kluster

		✓ Disperindang ikut berperan ketika ada pameran dan masalah pemasaran khusus UMKM
3.	Pemerintah Desa	✓ Sebagai mediator untuk para masyarakat dalam memajukan potensi lokal ✓ Membantu mengembangkan potensi lokal
4.	Petani enceng gondok	✓ Membantu mencari bahan baku untuk para pengrajin enceng gondok ✓ Membantu mengurangi pertumbuhan enceng gondok yang terus berkembang
5.	Pengepul	✓ Memberikan kontribusi dari segi pendapatan untuk para petani enceng gondok

Sumber : Data Primer 2015, diolah

Kolaborasi Antar Stakeholders

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi (Klapwijk, 1997), kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Kolaborasi antara BAPPEDA Kabupaten dengan dinas-dinas terkait dan para anggota klaster harus terjalin dengan baik agar tujuan dari pengembangan ekonomi lokal segera terwujud. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pencari enceng gondok mengatakan:

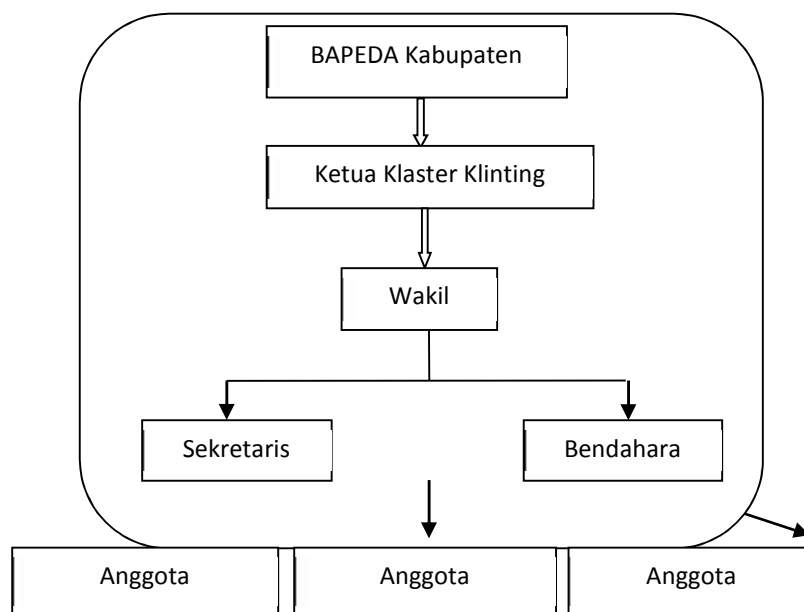
“Baik mbak, sejauh ini sih dalam pembayaran yaa lancar kepengurusannya juga baik, tidak yang memaksakan agar kita bekerja terus gitu, kalo para petani enceng dapatnya sedikit para pengepul juga menerima seadanya”

Kerjasama antara pencari enceng gondok dan pengepul terjalin dengan baik serta transaksi pembayaran pun juga lancar. Kolaborasi ini terjadi karena mereka saling membutuhkan dari segi pendapatan dan jasa. Para pengepul yang datang setiap hari ke rawa memiliki peranan terhadap pendapatan para pencari enceng gondok, dan tentunya para masyarakat di Desa Kebondowo memiliki tambahan pendapatan. Wawancara dengan pengrajin enceng gondok dan ketua klaster klinting mengatakan:

“Iya,, saya sering melibatkan ibu-ibu untuk membantu entah itu untuk mengepang enceng gondok kering tapi sekarang saya lebih sering menyuruh membuat lembaran enceng gondok per lembar eceng gondok dihargai Rp 5000.- dan itu lembarannya disusun sehingga menjadi lembaran yang lumayan panjang setiap lembaran susunanya 4 batang eceng gondok yang sudah dipipihkan. ”

Kolaborasi yang dibina pengrajin enceng gondok dan masyarakat desa menunjukkan dampak ekonomi yang terjadi di dalam proses pembuatan kerajinan enceng gondok. Ibu-ibu membantu untuk mengepang enceng gondok kering yang per lembarnya dihargai Rp 5.000,-. Kolaborasi ini saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, yaitu menambah pendapatan dan para ibu-ibu bisa mengolah kemampuan mereka untuk membuat kerajinan enceng gondok.

Gambar 2
Struktur Organisasi Masyarakat Pendukung PEL Kluster Klinting



Sumber: Data diolah

Penanggung jawab terbesar dalam proses koordinasi yang terjadi di dalam organisasi pendukung PEL kluster klinting adalah BAPEDA Kabupaten. BAPEDA Kabupaten secara langsung menunjuk Slamet Triamanto sebagai ketua kluster klinting. Alasan yang kuat untuk memilih Slamet Triamanto sebagai ketua karena kemampuan dan pengalamannya dalam hal pelatihan dan pembuatan kerajinan enceng gondok. Slamet Triamanto berkoordinasi dengan pengurus kluster klinting yang lainya seperti Raffi Hartono sebagai wakil, Khomsah sebagai sekretaris dan Ngainah sebagai bendahara. Koordinasi tersebut sangat penting untuk pengembangan dalam sebuah organisasi.

Peranan petani enceng gondok dan pengepul juga turut mendukung dalam proses pengembangan Kluster Klinting. Para pencari enceng gondok selain menjual hasil enceng gondok ke pengepul, mereka juga menjualnya ke pengrajin

enceng gondok. Biasanya mereka menjual dalam bentuk enceng gondok yang sudah dikeringkan. Koordinasi yang terjadi antara pengrajin dan pencari enceng gondok tentu dapat memberikan kontribusi yang sangat baik.

Enceng Gondok Sebagai Basis PEL

Potensi yang ada di Desa Kebondowo sangat melimpah dan menguntungkan bagi sebagian masyarakat desa tersebut. Pemerintah memilih enceng gondok dijadikan sebagai basis PEL juga berdasarkan dari hasil yang bisa diolah dan dikembangkan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan BAPPEDA selaku pengampu kegiatan FEDEP dibidang ekonomi mengungkapkan :

“Kalo enceng gondok itu sudah mencangkup 5 Kecamatan yaitu Bawen, Tuntang, Banyubiru, Jambu, Ambarawa dan itu masing-masing Kecamatan sudah ada kelompoknya masing-masing dan itu dibagi spesialisnya masing-masing Kecamatan Tuntang membuat mebel dari enceng gondok kalo di Kecamatan Banyubiru membuat aksesoris dan masing-masing kelompok udah punya spesialis/ keahlian masing-masing cuman ketuannya enceng gondok ya satu yaitu Pak ST dan yang paling banyak enceng gondok itu di Kecamatan Banyubiru khususnya di Desa Kebondowo.”

BAPPEDA memilih enceng gondok sebagai PEL karena melihat potensi enceng gondok di 5 kecamatan di Kabupaten Semarang dan tiap kecamatan sudah memiliki kelompok dan keahlian masing-masing. Tanaman enceng gondok sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga untuk mengurangi tanaman enceng gondok diolah menjadi berbagai hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Wawancara yang dilakukan dengan Ketua Klaster Klinting mengatakan:

“Enceng gondok dipilih karena banyaknya enceng gondok dirawa pening ini selain itu tanamannya bisa dibuat beraneka ragam kerajinan yang bagus dan menarik dan yang lebih penting memiliki nilai jual yang tinggi dari batang enceng gondok bisa membuat kursi, meja, tempat tisu saya rasa pantas juga jika tanaman tersebut menjadi keunggulan lokal”

Peran Modal Sosial di dalam Klaster Klinting

Modal sosial yang didasari imbal balik antara norma dan kepercayaan antar masyarakat ataupun antar kelompok klaster dalam satu jaringan akan mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat. Modal sosial yang ada di dalam masyarakat biasanya tercermin kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang membentuk sebuah jaringan untuk mencapai tujuan yang sama serta didasari

saling kepercayaan dan norma. Organisasi lokal akan memberikan sumbangan dalam meningkatkan modal sosial masyarakat dan kelompok sekitar untuk mencapai tujuan bersama. Peran modal sosial masyarakat dalam PEL sangat penting. Timbal balik antar PEL dengan peningkatan ekonomi sangat kompleks, sehingga harus didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berwenang dan terlibat dalam PEL dari mulai dinas-dinas yang berwenang, pemerintah daerah, investor sampai dengan masyarakat.

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah sebuah pendekatan pemberdayaan potensi lokal sebagai pelaku utama serta melibatkan instansi pemerintahan dan meletakkan konteks masyarakat paradigma baru, serta pembangunan yang bersifat pengembangan yang berkelanjutan. PEL tidak berarti upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama dan partisipasi masyarakat secara global. PEL merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat melalui segi pendapatan dan segi tenaga kerja. Keterlibatan sejumlah orang yang berskala besar dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial. Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat Desa Kebondowo dalam menyukseskan PEL. Masyarakat Desa Kebondowo dituntut ikut berpartisipasi dalam PEL yang berbasis dalam menggali potensi lokal yang terdapat di suatu wilayah. Wawancara yang dilakukan dengan ketua Klaster Klinting mengungkapkan :

“Meskipun untuk saat ini anggapan anggota untuk klaster ini masih masalah uang saku saja, karena di setiap pertemuan dikasih uang saku kalau partisipasinya belum ada. Karena pola pikir masyarakat yang masih lemah belum mau bergerak untuk mencoba membuat kerajinan enceng gondok skill masyarakat dan anggota klaster untuk membuat kerajinan belum bisa. Justru norma yang mereka dapatkan itu masih kurang dan mereka belum bisa untuk mengubah pola pikir mereka masing-masing.”

Dampak Ekonomi yang Ditimbulkan Adanya Klaster Enceng Gondok untuk Masyarakat di Banyubiru

Aktivitas Klaster banyak bergantung pada pencari enceng gondok, faktor pencarian enceng gondok yang memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra serta proses penjemuran yang tentunya memakan waktu sehari-hari membuat para pengrajin sebagian besar membeli bahan baku dari pencari enceng gondok. Para pencari enceng gondok menjual hasil enceng gondok mereka ke pengrajin, ternyata mereka juga menjualnya ke pengepul Jogja dan Solo. Para pengepul

setiap hari datang ke Desa Kebondowo untuk membeli enceng gondok, hasil wawancara dengan pencari enceng gondok menyatakan:

“Para pengepul itu dari Jogja dan Solo mbak, tapi yang paling banyak dari Jogja setiap hari datang kesini ya untuk membeli enceng gondok itu.”

Adanya pengepul dari luar kota yang datang setiap hari menandakan di Desa Kebondowo memiliki potensi lokal yang sangat menguntungkan bagi pengepul luar kota dan para pengrajin enceng gondok. Tanaman enceng gondok di rawa sangat melimpah dan para pengepul yang datang setiap hari enceng gondok tidak berkurang. Wawancara yang dilakukan dengan Pencari enceng gondok mengatakan:

“Kalo dari segi pendapatan ya lumayan mbak, dari jam 06.00 sampai jam 11.20 ini saya sendiri sudah mendapatkan enceng gondok capai 3 kwintal mbak, kalo diungkan ya saya mendapatkan uang Rp 60.000,- mbak.”

Peranan enceng gondok dari segi pendapatan sangat menguntungkan bagi para pencari enceng gondok. Penghasilan yang mereka peroleh dalam sehari yaitu Rp 60.000,- dalam waktu kurang lebih 6 jam. Selain mencari enceng gondok, mereka juga memanfaatkan potensi lokal yang ada di rawa. Hasil wawancara dengan pencari enceng gondok mengatakan:

“Rumput yang ditengah-tengah rawa itu laku, terus asola kalo bahasa jawanya tu ketepang. Kalo ketepang itu prosesnya digiling buat makanan ternak perkintalnya itu harganya sama kayak enceng gondok Rp 20.000,- terus keong, ikan, ganggang rantai buat tambak cari ikan, tanah gambut (tanah hitam) tanah itu digunakan untuk pupuk dan penanaman jamur.”

Para pencari enceng gondok juga memanfaatkan potensi lainnya yang ada di rawa dengan mencari rumput rawa, keong, ikan, ganggang dan tanah gambut (tanah hitam), sehingga mereka dapat menambah penghasilan dengan memanfaatkan dan menggali potensi lokal yang ada di dalam rawa. Masyarakat di Desa Kebondowo juga mereka mencari ikan untuk lauk sehari-hari dan mengolah hasil yang terdapat di rawa.

Peran Klaster Enceng Gondok dari Segi Penyerapan Tenaga Kerja

Masyarakat di Desa Kebondowo memanfaatkan waktu luang mereka untuk menganyam atau mengepang batang enceng gondok. Selain mendapatkan tambahan penghasilan, mereka juga menambah kemampuan mereka untuk membuat kerajinan. Peranan klaster enceng gondok tidak hanya memberikan

tambahan penghasilan bagi para pencari enceng gondok, tetapi juga menyerap tenaga kerja bagi masyarakat Desa Kebondowo. Wawancara yang dilakukan dengan pencari enceng gondok mengatakan:

“Dari segi penyerapan kerja klaster enceng gondok cukup banyak menyerap tenaga kerja mbak, soalnya ya itu setiap hari mereka bisa mencari enceng gondok dan mendapatkan uang langsung nambahin uang keseharian kami jadi buruh kasar.”

Masyarakat Desa Kebondowo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Namun, jika hanya mengandalkan hasil panen saja yang dalam satu tahun hanya bisa panen sekali sampai dua kali saja tentunya kebutuhan mereka tidak tercukupi. Oleh sebab itu, mereka mencari tambahan penghasilan dengan mencari enceng gondok di rawa

Keterkaitan Klaster Enceng Gondok dalam Kerjasama dengan Sektor Lain

Sebuah rantai nilai adalah rangkaian kegiatan untuk operasi perusahaan dalam industri yang spesifik. Selama ini proses kerjasama yang di bangun klaster klinting untuk membentuk suatu rantai nilai yang bekerjasama dengan sektor lain belum terlaksana. Hal tersebut menjadi kendala dalam proses produksi dan pemasaran. Kerjasama berupa rantai nilai belum terjadi di dalam organisasi klaster klinting, tetapi rantai nilai dari para petani enceng gondok dan pengepul sudah lama terjadi dan hal tersebut saling menguntungkan bagi petani enceng gondok dan pengepul.

Mengubah pola pikir sangat dibutuhkan untuk kemajuan klaster enceng gondok. Selain itu, diperlukan kerjasama antar sektor lain dalam segi pemasaran. Wawancara dengan pengrajin enceng gondok dan juga selaku Ketua Klaster Klinting mengatakan:

“Untuk saat ini belum karena, belum jalan dengan optimal kalo didalam kelompok PEL itu sudah mampu berproduksi semua baru akan bekerjasama dalam sektor pemasaran di kampung rawa, dan penitipan ke showroom-shoroom handycraft, membuka link di BUMN dan bank-bank juga”

Klaster klinting belum mampu membentuk suatu *value chain* (rantai nilai) untuk bekerja sama dengan sektor lain dikarenakan klaster belum berjalan optimal dan dalam segi produksi, sebagian anggota klaster belum mampu untuk memproduksi hasil kerajinan enceng gondok. Masalah produksi juga terkendala dalam dana untuk pembelian bahan baku, pembelian alat-alat dan kemampuan

para anggota klaster belum terlatih secara baik. BAPPEDA Kabupaten dan ketua klaster mencoba memberikan motivasi yang membangun serta pelatihan secara intensif.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Zeinalnezhad (2011) mengatakan pentingnya kelompok dalam pengembangan usaha kecil dan menengah perusahaan serta masalah jaringan. Penelitian ini menjelaskan potensi lokal yang ada di Desa Kebondowo, menjadikan masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam PEL yang terjadi di Desa Kebondowo. Organisasi di Desa Kebondowo dan Kecamatan Banyubiru dalam mendukung klaster akan memperkuat rasa saling percaya dan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu satu dengan yang lain. Kelembagaan dalam bentuk kelompok atau organisasi akan memperkuat modal sosial dan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu dan kelompok satu dengan yang lainnya.

Pembentukan sebuah kelompok atau organisasi dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Kelompok atau organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Peran serta masyarakat dan pemerintah dalam memelihara sumber daya alam yang dimiliki merupakan hal yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik PEL. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui bentuk kelembagaan lokal yang mendukung klaster di Kecamatan Banyubiru yang lokasinya berada di Desa Kebondowo.

Pembentukan klaster klinting ini bertujuan untuk menciptakan hasil potensi lokal yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan dikelola oleh para anggotanya. Klaster klinting mencoba memberikan alternatif PEL berupa kerajinan enceng gondok agar para pengrajin enceng gondok mempunyai tempat untuk mengembangkan hasil kerajinan yang sudah mereka buat. Beberapa tahun ini perkembangan klaster klinting sudah mulai berkembang meskipun dalam segi produksi dan pemasaran masih belum maksimal. Kelembagaan dalam sebuah organisasi dibentuk untuk membuat sebuah aturan untuk mengatasi masalah yang akan timbul didalam organisasi dan perkumpulan sebuah lembaga. Contohnya

seperti di dalam klaster klinting yang sekarang ini sudah sering diadakan pelatihan dan *workshop-workshop* untuk melatih *skill*.

Tabel 4.2
Fungsi Kelembagaan Lokal di Desa Kebondowo

No	Kelembagaan Lokal	Bentuk Kelembagaan	
		Sebagai Fungsi Organisasi/Paguyuban	Sebagai Aturan main (<i>the rules of the game</i>)
1.	Kelompok Jasa Bengok dan Mutiara Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam mencari enceng gondok dan dalam penerimaan uang dari pengepul - Menciptakan alternatif dalam segi komunikasi/ musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat - Sebagai wadah saling koordinasi dalam memberikan arahan antar anggota kelompok - Menyatukan visi dan misi antar organisasi pendukung/penunjang agar tidak berjalan sendiri-sendiri - Sebagai wadah <i>sharing</i> dan koordinasi dengan pihak pengepul 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua koordinasi mengenai pengurangan tanaman enceng gondok yang terus menerus berkembang
2	Paguyuban Dagang Kebondowo Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat hasil tanaman enceng gondok yang dikumpulkan oleh para petani enceng gondok - Sebagai wadah untuk saling <i>sharing</i> koordinasi, mengatur, menyelesaikan masalah antara pengepul dan petani enceng gondok - Menjadi wadah untuk para pengrajin enceng gondok untuk memajukan hasil kerajinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat aturan tata tertib dengan cara setelah mencari enceng gondok para petani enceng harus melapor ke penjaga warung agar dicatat hasil enceng yang didapat yang nantinya hasil enceng gondok di tukar dengan uang dan ini bersifat internal Paguyuban Dagang
3	Klaster Klinting	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengembangkan potensi lokal yaitu tanaman enceng gondok - Memberikan kontribusi bagi para anggota klaster agar semakin dikenal dengan hasil kerajinannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Membatasi jumlah anggota agar koordinasi bisa lebih mudah terjalin - Mengatur para anggota klaster agar tertib dalam setiap pertemuan - Menetapkan kegiatan yang berada didalam klaster

Sumber: Data Primer 2015, diolah

Pembentukan dan pengembangan klaster tidak terlepas dari peran orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Peneliti juga melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan, pengelolaan dan pengembangan klaster serta mengetahui interaksi yang terjadi diantara mereka. Observasi dan wawancara pertama dilakukan kepada BAPPEDA Kabupaten Semarang dan selanjutnya melalui informasi yang didapat dari informan pertama dilakukan observasi dan wawancara selanjutnya kepada pihak-pihak yang berwenang lainnya. *Stakeholder* dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan klaster klinting. *Stakeholder* tersebut terdiri dari GIZ, BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Kabupaten, Disperindang, Pengembang/ Investor dan Pengepul. Mereka mempunyai peran dan kewenangan masing-masing dalam pengelolaan dan pengembangan klaster.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) di Desa Kebondowo yang dibentuk oleh pemerintah dalam suatu organisasi disebut dengan Klaster Klinting. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan ekonomi Jawa Tengah, khususnya dalam pengembangan sektor UKM. Pembentukan dan pengembangan klaster Klinting tentunya melibatkan pemerintah dan BAPPEDA Kabupaten Semarang

Penelitian ini menunjukkan bahwa PEL dengan mengangkat potensi lokal berupa tanaman enceng gondok di Desa Kebondowo memiliki peranan yang baik untuk masyarakat. Adanya Klaster Klinting dapat membantu masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan mereka dan mengurangi pengangguran karena mampu menyerap tenaga kerja di Desa Kebondowo. Selain itu, para pengrajin enceng gondok dapat mengkontribusikan hasil kerajinan mereka meskipun belum secara maksimal. Peran modal sosial masyarakat dalam PEL sangat penting karena adanya timbal balik, dimana kerjasama dan partisipasi masyarakat digunakan untuk kepentingan bersama melalui segi pendapatan, pekerjaan dan untuk kesejahteraan bersama. Koordinasi dalam bentuk kerjasama antara klaster klinting dengan *stakeholder* sangat di perlukan proses pembentukan dan pengembangan Klaster Klinting tergantung dari *stakeholder*.

Hasil penelitian, analisis, serta interpretasi data, penulis mempuikan beberapa saran yaitu:

1. Pola pikir anggota klaster dan masyarakat harus mulai menamamkan pola pikir yang maju dan terarah mereka harus diberikan pendampingan secara *intens* agar mereka lebih bisa mengelola dan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan lebih serius.
2. Pemerintah dan dinas-dinas yang terkait didalam pembentukan dan pengembangan klaster Klinting harus lebih memberikan pendampingan yang lebih, jika hanya diadakan workshop-workshop setiap bulanya maka para anggota klaster yang belum bisa berproduksi akan semakin lama tidak mencoba membuat kerajinan enceng gondok maka dari itu disaat BAPPEDA Kabupaten mengadakan seminar harus diadakan juga pembuatan kerajinan enceng gondok secara langsung agar pemerintah dan dinas-dinas terkait mengetahui sejauh mana para anggota klaster bisa memproduksi.
3. Pemerintah dan para anggota PEL harus bekerjasama terkait pengembangan klaster klinting sehingga mampu melakukan kerjasama dalam hal pemasaran dan promosi untuk kemajuan klaster klinting.

DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, Edward J. 1989, *Planning Local Economic Development*, California: Sage Publication.
- Coffey, H & Polese, 1984. *The Concept of Local Development: A Stage Model of Endogeneous Regional Growth: Paper of Regional Science.*
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. 2013, *Data Jumlah Unit UMKM dan Tenaga Kerja Kota Semarang, Tahun 2005-2013, Semarang.*
- Firman, Tommy, 1999. *Dampak Pembangunan SDA pada Ekonomi Lokal di Kawasan Timur Indonesia: Prisma ITB.*
- Herdiansyah, Haris. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika
- JICA, 2004. Final Reports of the Study on Strengthening Capacity of SME Clusters in Indonesia, Japan International Agency.
- Klapwijk, M. 1997. *Rural Clusters in Central Java, Indonesia: An empirical assessment of their role in rural industrialization.* Ph. D. Dissertation, Tinbergen institute Research Series NO.153, Vrije Universiteit, Amsterdam.
- LPM-ITB. 2001, Studi Pembentukan Kluster Industri Kecil Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, ITB.
- Munir, Risfan dan Rifanto, 2007, *Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif, LGSP, USAID.*
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Weijland, H. 1999. *Microenterprise Cluster Rural Indonesia: Industri Seedbed and Policy Target.* *Journal World Development.* 2(6)
- Wolfe, D. A. And T. Creutzberg, 2003. *"Community Participation and Multilevel Governance Economic Development Policy" Paper Prepared for the Panel on the Future Role of Government at www. law-lib. Utoronto. Ca/ investing/ research_Papers.*
- Zeinalnezhad, Shahrbanun Sahnan. 2011. *The Roll of Clusters and Network in Development of Industrial SMEs: International Conference on Business and Economics Research.* Press Kuala Lumpur. Malaysia. Vol 1